



BUPATI MERAUKE

Merauke, 28 Desember 2023

Nomor : 600.1.4 / 6943
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Pernyataan Komitmen Kepala Daerah**

**Kepada Yth. :
Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di-
Jakarta**

Menindaklanjuti permohonan keikutsertaan kami pada Program Percepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan sebagai upaya mencapai target akses air minum jaringan perpipaan di perkotaan, bersama ini dengan hormat kami menyampaikan **Komitmen** selaku Kepala Daerah terhadap usulan kegiatan percepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan, sebagai berikut:

- a. Mengamankan pelaksanaan konstruksi, perizinan, dan hambatan sosial lainnya;
- b. Menerima hibah aset infrastruktur yang akan dibangun;
- c. Memastikan ketersediaan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan aset;
- d. Melakukan peningkatan kinerja pelayanan air minum kepada Masyarakat;
- e. Melakukan peningkatan kinerja BUMD Air Minum (Jika kelembagaan SPAM adalah BUMD), melalui:
 - 1) Pengalokasian Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD Air Minum;
 - 2) Penerapan Tarif FCR atau memberikan subsidi (selisih tarif) atas penetapan tarif non FCR;
 - 3) Pelaksanaan Program penurunan air tak berekening (*non-revenue water*/NRW);
 - 4) Pemutakhiran Rencana Bisnis;
 - 5) Penerapan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM);
 - 6) Peningkatan efektifitas dan efisiensi produksi
 - 7) Pelaksanaan program peningkatan kompetensi SDM
 - 8) Peningkatan kinerja pelayanan air minum melalui pemenuhan kuantitas, kualitas, kontinuitas (K3);
 - 9) Dan lain-lain.

Demikian surat pernyataan komitmen ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

**BUPATI MERAUKE**
Drs. ROMANUS MBARAKA, MT

Tembusan kepada Yth :

1. Direktur Air Minum, Dirjen Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Jendral Sumber Daya Air – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat – Kementerian Kesehatan
4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah – Kementerian Dalam Negeri
5. Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah – Ditjen Bina Keuangan Daerah